

---

# LAPORAN KEUANGAN

---

Per 31 Desember 2021



**INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT**

JL. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. ( 0512 ) 22384 Pelaihari 70814

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

*Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut* adalah entitas akuntansi dari *Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut* yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan *pembiayaan*. Berdasarkan laporan ini, Realisasi belanja TA 2021 (31 Desember 2021) sebesar Rp. 9.628.909.116,00 atau mencapai 85,17% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 7.422.970.289,00 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.537.833.577,00 dan belanja modal sebesar Rp. 668.105.250,00;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut per *31 Desember 2021*. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.1.302.383.895,74 kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 115.682.340,00;
3. Laporan Operasional memberikan informasi tentang pendapatan, dan beban operasi. Berdasarkan laporan ini, laporan operasional Pendapatan Daerah *31 Desember 2021* adalah Pendapatan Daerah pada TA 2021 adalah Rp. 0,-. Sementara itu Beban operasi TA 2021 (31 Desember 2021) sebesar Rp. 8.918.082.967,00 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 7.422.970.289,00; beban barang dan jasa sebesar Rp. 1.495.112.678,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas lainnya dan Ekuitas akhir. Berdasarkan laporan ini, Ekuitas awal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.946.214.923,00 Sementara itu, Defisit-LO adalah sebesar Rp. 8.918.082.967,00, Kewajiban untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp. 9.628.909.116,00 sehingga Ekuitas Akhir Inspektorat Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.657.041.072,00;
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan *31 Desember 2021* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Pelaihari, 31 Desember 2021  
Inspektur,

Drs. H. HUSEIN IRIANTA  
NIP. 19630720 198503 1 015

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penulisan Calk	2
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	4
2.1 Ekonomi Makro	4
2.2 Kebijakan Keuangan	6
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja	7
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja dan Keuangan	8
3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
3.2 Realisasi Anggaran Per Kegiatan	8
3.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target	9
Bab IV Kebijakan Akuntansi	10
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan keuangan	14
5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
5.2 Penjelasan Umum Neraca	14
5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional	17
5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	18
Bab VI Penutup	19
Lampiran	
1. Neraca	
2. LRA	
3. LO	
4. LPE	
5. KIB A-F	
6. ASET LAINNYA	
7. LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul;

### 1.3 Sistematika Penulisan Calk

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

#### **Sistematika penyajian laporan keuangan Satuan Kerja**

##### **1. Sampul Luar**

Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

##### **2. Sampul Dalam**

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

##### **3. Kata Pengantar**

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

##### **4. Daftar Isi**

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

##### **5. Bab I**

Bab ini memuat uraian maksud dan tujuan pelaporan keuangan, Landasan Hukum pelaporan keuangan dan Sistematika Penulisan CALK.

**6. Bab II**

Bab ini mengenai Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

**7. Bab III**

Bab ini memuat Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

**8. Bab IV**

Bab ini memuat uraian Kebijakan akuntansi

**9. Bab V**

Bab ini memuat uraian Penjelasan Pos-pos laporan keuangan

**10. Bab VI**

Merupakan bab penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Sebagai satuan kerja pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun rencana strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

#### **VISI**

Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan menjadi Aparatur Pengawasan Internal yang Berwawasan, Kompeten, Inovatif, Enerjik dan Elegan serta Akuntabel (BERKINERJA).

#### **MISI**

Adapun misi yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah Penggerak Sistem Pengendalian Internal; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik; Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

#### **TUJUAN**

Sebagaimana definisi yang ada dalam penyusunan Renstra, maka pengertian tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi strategik yang ada maka telah ditetapkan yaitu “Terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; terwujudnya sumber daya aparatur pengawasan yang berbasis kompetensi dengan jumlah memadai; Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien”.

#### **SASARAN**

Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas speksifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah “Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap



pengelolaan keuangan; Meningkatnya efektifitas perencanaan, pelaksanaan pengendalian; Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat; efektifitas hasil pengawasan; Meningkatnya sistem penegndalian internal; hasil evaluasi RB dan ZI; Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD; Meningkatnya hasil evaluasi zona integritas WBK pada unit pelayanan publik; Meningkatnya kualitas SDM pengawasan; Meningkatnya kelancaran penatausahaan administrasi perkantoran dan Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan”.

## **KEBIJAKAN**

Keberadaan institusi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN.

## **PROGRAM**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
9. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
10. Program Pendampingan dan Asistensi.

## KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
5. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;
6. Pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan;
7. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
11. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
12. Pengadaan peralatan dan mesin;
13. Penyediaan jasa surat menyurat;
14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
15. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
16. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
17. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
18. Pengawasan kinerja pemerintah daerah;
19. Pengawasan keuangan pemerintah daerah;
20. Reviu laporan kinerja;
21. Reviu laporan keuangan;
22. Pengawasan desa;
23. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
24. Pengawasan dengan tujuan tertentu;
25. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
26. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;

27. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
28. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

### a. Pendapatan

Realisasi dan persentase anggaran pada TA 2021 (31 Desember 2021) adalah nihil.

### b. Belanja

Realisasi belanja TA 2021 (31 Desember 2021) sebesar Rp. 9.629.909.116,00 atau mencapai 85,16% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 7.422.970.289,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.537.833.577,00 dan belanja modal sebesar Rp. 668.105.250,00.

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut TA 2021 (31 Desember 2021) merupakan laporan yang mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut TA 2021 (31 Desember 2021) memperoleh anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 11.305.633.175,00.

Dari total anggaran diatas, rincian anggaran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	
Belanja Pegawai	Rp 4.024.311.760,00
<b>Belanja Langsung</b>	
Belanja Pegawai	Rp 496.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.148.406.076,00
Belanja Modal	Rp 110.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6.779.567.836,00</b>

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Keuangan

3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Adapun capaian target kinerja sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Maturitas SPIP	Tidak ada penilaian	3,3	2,82	85,45	3.5	2,28

Sumber :E-sakip

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

##### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi belanja TA 2021 (31 Desember 2021) sebesar Rp. 9.628.909.116,00 atau mencapai 85,16% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 7.422.970.289,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.537.833.577,00 dan belanja modal sebesar Rp. 668.105.250,00.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	8.354.270.197	7.422.970.289	88,85
2	Belanja Barang dan Jasa	2.216.668.174	1.537.833.577	69,37
3	Belanja Modal	734.694.804	668.105.250	90,93
		11.305.633.175	9.628.909.116	85,16

Sumber Data : Simda Keuangan Tahun 2021

##### 3.2 Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan

Nomor	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	67,617,746	39.2172.30	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,138,420	5.492.400	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32,230,326	28.724.830	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,249,000	5.000.000	
<b>2</b>	<b>Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	8.379.605.573	7.446.138.419	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.354.270.197	7.422.970.289	
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25,335,376	23.168.130	
<b>3</b>	<b>Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	189,624,520	136.124.450	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21,417,000	18.396.400	
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	168,207,520	117.728.050	
<b>4</b>	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	655,100,974	5124.248.03	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81,855,690	10.580.000	

4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,353,564	162.657.600	
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36,378,320	15.522.927	
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,818,400	11.301.600	
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319,695,000	312.362.676	
<b>5</b>	<b>Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	522,932,410	471.496.950	
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	522,932,410	471.496.950	
<b>6</b>	<b>Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	154,039,882	109.329.830	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,293,600	2.564.400	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91,820,600	56.613.373	
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57,925,682	50.152.057	
<b>7</b>	<b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	132,200,000	56.729.320	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69,000,000	38.653.520	
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63,200,000	18.075.800	
<b>8</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	589,418,870	334.573.664	
8.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	173,985,134	126.323.884	
8.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	68,458,270	34.710.950	
8.3	Reviu Laporan Kinerja	42,777,080	15.866.000	
8.4	Reviu Laporan Keuangan	69,052,620	11.791.800	
8.5	Pengawasan Desa	115,571,960	91.566.600	
8.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	119,573,806	54.314.430	
<b>9</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	56,040,500	10.600.050	
9.1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	56,040,500	10.600.050	
<b>10</b>	<b>Program Pendampingan dan Asistensi</b>	559,052,700	439.534.900	
10.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	97,661,980	81.255.000	

10.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	124,367,890	74.666.000	
10.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	306,284,300	264.159.900	
10.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30,738,530	19.454.000	
<b>Jumlah</b>		11.305.633.175	9.628.909.116	85,16

Sumber Data : Simda Keuangan Tahun 2021

### 3.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tidak terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2021.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah  
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2004), Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  
Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten terdiri atas :

- Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah. Saldo rekening di Kas daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah daerah yang dikuasasi dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan.

Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor.



Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintah bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus di konversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara:

- biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

c) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua Belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanmana investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Investasi Non permanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.

Obligasi dinilai sebesar nilai nominal.

Penyertaan Modal proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

d) Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset tetap Lainnya
- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikannya berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (capitalization threshold) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut :

- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan dan mesin yang sama atau lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas

e) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten yang terdiri dari Ekuitas dana Lancar, Ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

f) Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusunan terhadap aset tetap.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

##### a. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi belanja TA 2021 (31 Desember 2021) sebesar Rp. 9.628.909.116,00 atau mencapai 85,16 % dari anggarannya sebesar Rp. 11.305.633.175,00. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 4.252.656.485,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.114.841.748,00 dan belanja modal sebesar Rp. 107.470.000,00.

##### b. Belanja

Realisasi belanja TA 2021 (31 Desember 2021) sebesar Rp. 9.628.909.116,00 atau mencapai 85,16 % dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 7.422.970.289,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.537.833.577,00 dan belanja modal sebesar Rp. 668.105.250,00.

#### 5.2 Penjelasan Umum Neraca

##### a. Penjelasan Umum Neraca

Posisi neraca per 31 Desember 2021 terdiri atas Aset adalah sebesar Rp. 2.657.041.072,00, kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 2.657.041.072,00.

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.657.041.072,00 terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 42.364.500,00 Aset tetap sebesar Rp. 2.589.717.572,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp. 24.959.000,00.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.657.041.072,00.

##### b. Penjelasan Per Pos Neraca

###### b.1 Aset Lancar

###### b.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,-

###### b.1.2 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 42.364.500,00.

dimana persediaan 2021 terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :

1. Persediaan Alat Tulis Kantor Rp. 18.364.500,00
2. Persediaan Printer Rp. 24.000.000,00

## b.2 Aset Tetap

### b.2.1 Tanah

Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 680.000.000,00

Mutasi/perubahan tanah sebesar nihil adalah sebagai berikut :

#### **PENAMBAHAN:**

Saldo Awal	: Rp. 680.000.000,00
Pembelian	: -
Mutasi Masuk	: -
Kapitalisasi Belanja B/J	: -
	: Rp. 680.000.000,00

#### **PENGURANGAN**

Penghapusan	: -
	: -
<b>Jumlah</b>	: Rp. 680.000.000,00

### b.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.959.281.726,00

Mutasi/perubahan peralatan mesin sebesar Rp. 595.365.750,00, tersebut adalah sebagai berikut :

#### **PENAMBAHAN:**

Saldo Awal	: Rp 1.363.915.976,00
Pembelian	: Rp 595.365.750,00
Mutasi Masuk	: -
Kapitalisasi Belanja B/J	: -
	: Rp 1.959.281.726,00

#### **PENGURANGAN**

Penghapusan	: -
Mutasi	: -
<b>Jumlah</b>	: Rp 1.959.281.726,00

#### b.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar  
Rp. 1.955.389.366,00

Mutasi/perubahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 72.739.500,00  
adalah sebagai berikut :

##### **PENAMBAHAN:**

Saldo Awal	: Rp. 1.882.649.866,00
Pembelian	: Rp. 72.739.500,00
Mutasi Masuk	: -
Kapitalisasi Belanja B/J	: -
	: Rp. 1.955.389.366,00

##### **PENGURANGAN**

Penghapusan	: -
	: -

<b>Jumlah</b>	: Rp. 1.955.389.366,00
---------------	------------------------

#### b.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesarRp. 0,00  
Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar  
Rp. 0,- adalah sebagai berikut :

##### **PENAMBAHAN:**

Saldo Awal	: Rp 0,00
Pembelian	: -
Mutasi Masuk	: -
Kapitalisasi Belanja B/J	: -
	: Rp 0,00

##### **PENGURANGAN**

Penghapusan	: -
	: -

<b>Jumlah</b>	: Rp 0,00
---------------	-----------

#### b.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.700.000,00  
Mutasi/perubahan aset lainnya sebesar Nihil Tersebut adalah  
sebagai berikut :

##### **PENAMBAHAN:**

Saldo Awal	: Rp 700.000,00
Pembelian	: -
Mutasi Masuk	: -
Kapitalisasi Belanja B/J	: -
	: Rp 700.000,00

##### **PENGURANGAN**

Penghapusan	: -
	: -

<b>Jumlah</b>	: Rp 700.000,00
---------------	-----------------

#### b.2.5 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah  
sebesar Rp. 2.668.000,00

#### b.2.6 Aset Lain - lain

Aset Lain - lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 34.785.000,00

#### b.2.7 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021  
sebesar Rp. (2.668.000,00)

#### b.2.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.  
(9.826.000,00)

#### b.3 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

#### b.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.657.041.072,00.

### 5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional

#### a. Penjelasan Umum Laporan Operasional

Pendapatan Daerah pada TA 2021 (31 Desember 2021) nihil yang terdiri  
dari : pendapatan asli daerah sebesar nihil, Pendapatan Transfer sebesar

nihil, Lain-lain PAD yang sah sebesar nihil, Surplus Non Operasional sebesar nihil dan Pendapatan luar biasa sebesar nihil.

Beban operasi TA 2021 (31 Desember 2021) sebesar Rp. 8.918.082.967,00 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 7.422.970.289,00 beban barang dan jasa sebesar Rp. 1.495.112.678,00.

b. Penjelasan per Pos Laporan Operasional

b.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah pada TA 2021 (31 Desember 2021) nihil yang terdiri dari : pendapatan asli daerah sebesar nihil, Pendapatan Transfer sebesar nihil, Lain-lain PAD yang sah sebesar nihil, Surplus Non Operasional sebesar nihil dan Pendapatan luar biasa sebesar nihil.

b.2 Beban Operasi

Beban operasi TA 2021 (31 Desember 2021) sebesar Rp. 8.918.082.967,00 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 7.422.970.289,00 beban barang dan jasa sebesar Rp. 1.495.112.678,00.

5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

a. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal sebesar Rp. 1.946.214.923,00 Defisit-LO sebesar Rp. 8.918.082.967,00 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan adalah sebesar Rp. 0,00 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp. 9.628.909.116,00 sehingga Ekuitas Akhir Inspektorat Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.657.041.072,00.

b. Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

b.1 Defisit-LO

Defisit-LO adalah sebesar Rp. 8.918.082.967,00

b.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah sebesar Rp. 0,00.

b.3 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan adalah sebesar Rp. 9.628.909.116,00



#### b.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Inspektorat Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.657.041.072,00

## BAB VI

### PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan *per 31 Desember 2021* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Pelaihari, 31 Desember 2021

INSPEKTUR,

ttd

Drs. H. HUSEIN IRIANTA  
NIP.19630720 198503 1 015

## LAMPIRAN :

1. Neraca
2. LRA
3. LO
4. LPE
5. KIB A-F
6. ASET LAINNYA
7. LAPORAN MUTASI BARANG  
PERSEDIAAN



## **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

### **INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telepon/Faximile ( 0512 ) 22384 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>

---

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 (per 31 Desember 2021) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaihari, 31 Desember 2021

Inspektur,

ttd

Drs. H. HUSEIN IRIANTA

NIP. 19630720 198503 1 015



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 4 . 02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
<b>Unit Organisasi</b>	: 4 . 02 . 01	Inspektorat Kabupaten
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 4 . 02 . 01 . 01	Inspektorat Kabupaten

URAIAN	2021	2020
<b>ASET</b>		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	42.364.500,00	5.985.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	42.364.500,00	5.985.500,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	680.000.000,00	680.000.000,00
Peralatan dan Mesin	1.959.281.726,00	1.363.915.976,00
Gedung dan Bangunan	1.955.389.366,00	1.882.649.866,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	700.000,00	700.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.005.653.520,00)	(2.005.653.520,00)
JUMLAH ASET TETAP	2.589.717.572,00	1.921.612.322,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.668.000,00	2.668.000,00
Aset Lain-lain	34.785.000,00	34.785.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.668.000,00)	(2.668.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(9.826.000,00)	(9.826.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	24.959.000,00	24.959.000,00

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4 . 02                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan		
<b>Unit Organisasi</b> : 4 . 02 . 01                   Inspektorat Kabupaten		
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 4 . 02 . 01 . 01           Inspektorat Kabupaten		
URAIAN	2021	2020
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.657.041.072,00</b>	<b>1.952.556.822,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	6.341.899,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	6.341.899,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341.899,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	2.657.041.072,00	1.946.214.923,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.657.041.072,00</b>	<b>1.952.556.822,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**Urusan Pemerintahan** : 4                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
**Bidang Pemerintahan** : 4 . 02                      Pengawasan  
**Unit Organisasi** : 4 . 02 . 01                      Inspektorat Kabupaten  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 02 . 01 . 01                      Inspektorat Kabupaten

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	11.305.633.175,00	9.628.909.116,00	85,17	8.332.752.466,00
5 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	10.570.938.371,00	8.960.803.866,00	84,77	8.108.519.166,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.354.270.197,00	7.422.970.289,00	88,85	6.028.859.545,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.216.668.174,00	1.537.833.577,00	69,38	2.079.659.621,00
5 . 2	<b>BELANJA MODAL</b>	734.694.804,00	668.105.250,00	90,94	224.233.300,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	660.294.804,00	595.365.750,00	90,17	219.233.300,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.400.000,00	72.739.500,00	97,77	5.000.000,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(11.305.633.175,00)	(9.628.909.116,00)	85,17	(8.332.752.466,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(11.305.633.175,00)	(9.628.909.116,00)	85,17	(8.332.752.466,00)

Pelaihari,                      Januari 2022

**Plt. Inspektur**

**Drs. H. HUSEIN IRIANTA**

NIP. 19630720 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan : 4 . 02		Pengawasan			
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01		Inspektorat Kabupaten			
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01		Inspektorat Kabupaten			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
7	<b>PENDAPATAN - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>BEBAN</b>	8.918.082.967,00	8.243.631.335,00	674.451.632,00	8,18
8 . 1 . 1	Beban Pegawai	7.422.970.289,00	6.028.859.545,00	1.394.110.744,00	23,12
8 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	1.495.112.678,00	1.949.602.237,00	(454.489.559,00)	(23,31)
8 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	91.607.488,00	(91.607.488,00)	(100,00)
8 . 2 . 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	173.562.065,00	(173.562.065,00)	(100,00)
8 . 2 . 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00



Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	: 4 . 02	Pengawasan
Unit Organisasi	: 4 . 02 . 01	Inspektorat Kabupaten
Sub Unit Organisasi	: 4 . 02 . 01 . 01	Inspektorat Kabupaten

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(8.918.082.967,00)	(8.243.631.335,00)	(674.451.632,00)	8,18
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(8.918.082.967,00)	(8.243.631.335,00)	(674.451.632,00)	8,18
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(8.918.082.967,00)	(8.243.631.335,00)	(674.451.632,00)	8,18

Pelaihari, Januari 2022  
**Plt. Inspektur**

**Drs. H. HUSEIN IRIANTA**  
NIP. 19630720 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4 . 02 Pengawasan		
<b>Unit Organisasi</b> : 4 . 02 . 01 Inspektorat Kabupaten		
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Kabupaten		
URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	1.946.214.923,00	1.650.595.668,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.918.082.967,00)	(8.243.631.335,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	206.498.124,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.628.909.116,00	8.332.752.466,00
EKUITAS AKHIR	2.657.041.072,00	1.946.214.923,00

Pelaihari, Januari 2022  
**Plt. Inspektur**

**Drs. H. HUSEIN IRIANTA**  
NIP. 19630720 198503 1 015